

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.
 - Pada bulan **April** komoditi yang mengalami penurunan harga pada Minggu ke-I IPH (-1,52%) yaitu cabai merah, cabai rawit dan udang basah. Minggu ke-II IPH (-1,61%) yaitu cabai rawit, tahu mentah dan daging ayam ras. Pada Minggu ke-III dengan IPH (-2,21%) dan Minggu ke-IV IPH (-2,42%) komoditi yang mengalami penurunan harga: adalah cabai rawit, tahu mentah dan daging ayam ras.
 - Pada bulan **Mei** komoditi yang mengalami penurunan harga pada Minggu ke-I IPH (-1,69%) yaitu Cabai rawit, bawang merah dan cabai merah. Komoditi tersebut kembali mengalami penurunan di Minggu ke-II (IPH -1,53%), Minggu ke-III dengan IPH (-1,55%) dan Minggu ke-IV IPH (-2,25%) serta Minggu ke-V dengan IPH (-2,68%).
 - Pada bulan **Juni** komoditi yang mengalami kenaikan harga Minggu ke-I IPH 2,26% yaitu daging ayam ras, beras dan tahu mentah. Pada Minggu ke-II dengan IPH 1,95% dan Minggu ke-III IPH 1,66% komoditi yang naik: beras dan tahu mentah. Minggu ke-IV IPH 1,66% komoditi yang naik adalah beras, tahu mentah dan bawang merah.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

1. Pada Bulan April terjadi penurunan harga cabai rawit karena pada saat tersebut panen cabai lokal sehingga ketersediaan cabai rawit di pasaran meningkat. Sedangkan untuk komoditi daging ayam ras menurun harganya karena permintaan tetap namun pasokan berlimpah di pasaran.
2. Pada Bulan Mei masih terjadi penurunan harga cabai rawit dan diikuti oleh cabai merah dan bawang merah dikarenakan tambahan pasokan yang dari hasil panen lokal.
3. Pada Bulan Juni terjadi peningkatan harga beberapa komoditi yang dipengaruhi oleh naiknya permintaan dikarenakan pada Minggu ke-I dan ke-IV Juni ada Hari Besar Keagamaan. Harga beras mengalami kenaikan baik beras medium dan beras premium, Hal ini terjadi karena BULOG masih menahan penjualan beras subsidi SPHP sehingga beras medium berkurang di pasaran yang berdampak pada permintaan beras premium sebagai alternatif untuk dikonsumsi masyarakat.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. TPID menyampaikan laporan monitoring pengendalian inflasi daerah setiap hari kerja pada laman [http:// wasinflasi.kemendagri.go.id](http://wasinflasi.kemendagri.go.id);
2. TPID rutin mengikuti zoom Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Kemendagri. Dinas Ketahanan Pangan rutin menyampaikan Laporan Neraca Ketersediaan Pangan setiap minggunya sebagai bahan kebijakan dan laporan harian;
3. Disperindag rutin menyampaikan Laporan Perkembangan Harga setiap harinya ke laman SP2KP Kemendag.
4. Bupati meresmikan Kios Pengendali Inflasi pada 22 April 2025 di Mesjid Agung SAM Sulaiman Tenggara dan Minimarket Universitas Kutai Kartanegara.
5. Bupati Kukar meresmikan Embung Maluhu pada 23 April 2025 di Kelurahan Maluhu Kec. Tenggara. Embung Maluhu adalah bagian dari program Pemkab Kukar dalam meningkatkan ketahanan pangan dan produktivitas pertanian. Selanjutnya Bupati Kukar menetapkan Desa Rapak Lambur Kec. Tenggara sebagai Wilayah Optimalisasi Lahan

(OPLAH) dalam rangka meningkatkan produksi dengan harapan panen bisa samapai 3 kali dalam satu tahun.

6. Bupati Kukar panen jagung dan ikan pada 24 April 2025 di Kelompok Tani Tri Rukun Kelurahan Maluhu, Kec. Tenggarong.
7. Melakukan Rapat Lanjutan pada 30 April 2025 membahas Peran Perusahaan Swasta mendukung Kios Inflasi dan memfasilitasi Juru Sembelih Halal (JULEHA) di Kab Kutai Kartanegara.
8. Bupati Kukar pada 6 Mei 2025 menyerahkan alsintan (hand traktor dua unit dan rice transplanter dua unit) dan pompa irigasi Brigade Pangan di Kec. Marangkayu, Samboja, Tenggarong dan Anggana serta penandatanganan MOU Pemkab Kukar dan Kodim 0908 Bontang tentang Sinergi, Kolaborasi dan Implementasi Program TNI dalam pembangunan daerah berkelanjutan di Kab. Kutai Kartanegara.
9. Menyampaikan surat Sekda Nomor B-2435/EK.II/500/05/2025 untuk dukungan perusahaan besar swasta pada Kios Pengendali Inflasi dan memfasilitasi Juru Sembelih Halal (JULEHA) di Kab Kukar.
10. Bupati Kukar melakukan panen padi pada 24 Mei 2025 bersama poktan Desa Mulawarman Kec. Tenggarong Seberang dan dilanjutkan dengan meninjau penggunaan alat tanam padi modern yaitu **rice transplanter** di Desa Bangun Rejo Kec. Tenggarong Seberang.
11. Melakukan rapat di Dinas Ketahanan Pangan Kab Kukar pada 22 Mei 2025 terkait Persiapan GPM (serentak se-Kaltim) pada 25 Mei 2025 CFD Tenggarong.
12. Menindaklanjuti Laporan Evaluasi BPKP mengenai Tata Kelola CPPD Tahun 2024 dengan surat Sekda Nomor: B-2713/EK.II/500/06/2025 ke Dinas Ketahanan Pangan dan perangkat daerah terkait.
13. Menindaklanjuti laporan Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Kukar dan petani pengguna BBM bersubsidi dengan surat Sekda Nomor: B-2584/EK.II/500/05/2025 dan Nomor : B-2776/EK.II/500/06/2025 ke PT. Pertamina Patra Niaga.
14. Pada tanggal 16 Juni 2025 Bupati Kukar dan Bupati Lombok Timur menandatangani MOU dan PKS dalam rangka sinergitas pembangunan terkait pembibitan dan peternakan sapi.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Pemerintah daerah melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan di perangkat teknis terkait guna mendukung program ketahanan pangan dan swasembada pangan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat.
2. Pemerintah daerah melakukan percepatan perbaikan dan peningkatan kualitas infrastruktur untuk kelancaran distribusi pasokan pangan agar pasokan pangan dan barang kebutuhan penting dapat tersalurkan ke seluruh pelosok Kabupaten Kutai Kartanegara.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Memastikan agar koordinasi serta sinergi antar instansi terkait dan masyarakat, untuk menjaga ketersediaan bahan pokok di pasaran sehingga mengantisipasi ketidakwajaran kenaikan harga komoditas pangan, gangguan distribusi dan penimbunan, termasuk pada BBM dan LPG bersubsidi dapat segera ditindaklanjuti.
2. Memastikan kebijakan pembangunan daerah berkelanjutan oleh pemerintah daerah dapat terinformasikan dengan baik dan jelas dalam menjaga keterjangkauan harga

kebutuhan pokok dan barang penting di pasaran guna menciptakan kondusifitas perekonomian dan ekspektasi positif masyarakat.